

## **VIHARA DHARMA MANGGALA SEBAGAI PUSAT PENGUATAN NILAI SOSIAL DAN SPIRITUALITAS UMAT BUDDHA TIONGHOA**

**Nadya Shafwah<sup>1</sup>, Zuhri Tahtadi<sup>2</sup>, Meilisa Kurniasih<sup>3</sup>, Ahmal. M.Hum<sup>4</sup>**

nadya.shafwah5517@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, zuhri.tahtadi4935@student.unri.ac.id<sup>2</sup>,  
meilisa.kurniasih0525@student.unri.ac.id<sup>3</sup>, ahmal@lecturel.unri.ac.id<sup>4</sup>

**Universitas Riau**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Vihara Dharma Manggala sebagai pusat penguatan nilai sosial dan spiritualitas umat Buddha Tionghoa di Pekanbaru. Kajian diawali dengan penelusuran sejarah kedatangan masyarakat Tionghoa ke Indonesia hingga terbentuknya komunitas Tionghoa di Pekanbaru sebagai bagian dari proses migrasi dan akulterasi budaya. Vihara Dharma Manggala, Merupakan salah satu cabang vihara di Riau yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan moral, sosial, dan spiritual umat. Melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, vihara ini berperan dalam memperkuat solidaritas komunitas, melestarikan nilai-nilai budaya leluhur, serta membangun harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Vihara Dharma Manggala, Tionghoa, Pekanbaru, Nilai Sosial, Spiritualitas.

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of Vihara Dharma Manggala as a center for strengthening the social values and spirituality of the Chinese Buddhist community in Pekanbaru. The discussion begins with an exploration of the history of Chinese migration to Indonesia, leading to the establishment of the Chinese community in Pekanbaru as part of a broader process of migration and cultural acculturation. Vihara Dharma Manggala, as one of the Buddhist temple branches in Riau, functions not only as a place of worship but also as a center for moral, social, and spiritual development among its devotees. Through various religious and social activities, the vihara plays an important role in fostering community solidarity, preserving ancestral cultural values, and promoting social harmony within the multicultural society of Pekanbaru.*

**Keywords:** Vihara Dharma Manggala, Chinese Community, Pekanbaru, Social Values, Spirituality.

## PENDAHULUAN

Vihara sebagai institusi keagamaan umat Buddha memiliki posisi yang strategis dalam konteks sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Tionghoa di Indonesia. Keberadaan vihara tidak hanya mencerminkan aspek religiusitas, tetapi juga menjadi simbol kontinuitas sejarah dan akulturasi budaya antara Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung selama berabad-abad. Seiring dengan perkembangan masyarakat multikultural di Indonesia, fungsi vihara mengalami perluasan, dari sekadar tempat peribadatan menjadi pusat interaksi sosial, pembinaan moral, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual yang berakar pada tradisi leluhur (Maharani, Purnawati, & Martayana, 2025). Dalam ranah akademik, vihara mulai dipandang sebagai ruang multidimensional yang mengintegrasikan aspek keagamaan, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.

Proses masuknya etnis Tionghoa ke wilayah Nusantara telah berlangsung sejak masa pra-kolonial, dipicu oleh hubungan perdagangan antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan maritim di Asia Tenggara. Interaksi tersebut melahirkan pertukaran budaya yang intens dan kemudian membentuk komunitas Tionghoa yang menetap di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah seperti Sumatra, Jawa, dan Bali. Seiring waktu, komunitas Tionghoa tidak hanya mempertahankan identitas etnis dan religius mereka, tetapi juga mengadopsi unsur-unsur budaya lokal dalam kehidupan sosial dan spiritual. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi yang dinamis, di mana vihara menjadi simbol harmonisasi antara nilai-nilai Buddha dan kearifan lokal (Maharani et al., 2025).

Penelitian Maharani, Purnawati, dan Martayana (2025) tentang Vihara Amurva Bhumi Blahbatuh di Gianyar memperlihatkan bahwa vihara tersebut merupakan manifestasi konkret dari pergulatan sejarah dan akulturasi budaya yang melibatkan etnis Tionghoa dan masyarakat Bali. Melalui bentuk arsitektur, simbolisme, serta praktik keagamaan yang dilakukan, vihara tersebut memperlihatkan perpaduan harmonis antara estetika arsitektur Tionghoa dan nuansa spiritualitas lokal. Lebih dari itu, penelitian ini menyoroti potensi vihara sebagai sumber belajar sejarah bagi siswa sekolah menengah, mengingat nilai-nilai historis, multikultural, dan edukatif yang terkandung di dalamnya. Pemanfaatan vihara sebagai media pembelajaran kontekstual dinilai mampu menumbuhkan kesadaran sejarah, rasa toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya di kalangan generasi muda (Maharani et al., 2025).

Aspek arsitektural dan tata ruang vihara juga menjadi bagian penting dalam memahami fungsi sosial dan spiritualnya. Larasati dan Lianto (2024) dalam penelitiannya mengenai revitalisasi Vihara Amurva Bhumi dengan pendekatan livability space menekankan pentingnya aspek kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan ruang vihara sebagai bagian dari peningkatan kualitas kehidupan umat. Pendekatan ini menempatkan vihara tidak hanya sebagai situs sakral, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan menciptakan ruang yang “layak huni” dan inklusif, vihara dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat kohesi sosial, memperluas partisipasi umat, serta mempertahankan relevansi fungsi vihara di tengah perubahan sosial dan urbanisasi (Larasati & Lianto, 2024).

Di sisi lain, penelitian Mahayani, Yasa, dan Martayana (2025) mengenai Vihara Dharma Ratna dan Krenteng Zhong Yi Miao di Semarapura Kauh, Klungkung, Bali, memperkaya pemahaman mengenai vihara sebagai ruang multikultural yang mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kedua tempat ibadah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia mampu mempertahankan warisan religius mereka sembari menyesuaikan diri dengan budaya lokal melalui proses asimilasi dan dialog antaragama. Penelitian ini juga menyoroti potensi vihara dan krenteng sebagai sumber belajar sejarah, terutama dalam konteks

pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebhinekaan dan spiritualitas (Mahayani, Yasa, & Martayana, 2025).

Jika ditinjau secara komparatif, ketiga penelitian tersebut memperlihatkan konsistensi pandangan bahwa vihara berperan ganda sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan. Vihara tidak hanya menjadi ruang kontemplasi spiritual, tetapi juga medium interaksi sosial yang merefleksikan nilai-nilai harmoni, gotong royong, dan multikulturalisme. Keberadaannya menegaskan pentingnya dialog antarbudaya dalam membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan toleran. Selain itu, konsep pemanfaatan vihara sebagai sumber belajar sejarah memperluas perspektif pendidikan, di mana situs keagamaan dapat menjadi sarana pembentukan karakter dan kesadaran sejarah siswa. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yang menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan, nilai, dan praktik kebudayaan lokal dalam proses pembelajaran (Maharani et al., 2025; Mahayani et al., 2025).

Dengan demikian, kajian terhadap vihara dalam berbagai konteks – baik sebagai situs akulterasi budaya, ruang sosial yang berkelanjutan, maupun sumber belajar sejarah – memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika peradaban Tionghoa di Indonesia. Revitalisasi dan penguatan fungsi vihara tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kualitas kehidupan umat Buddha Tionghoa, tetapi juga pada pelestarian warisan budaya bangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh Larasati dan Lianto (2024), keberlanjutan fungsi vihara harus diorientasikan pada keseimbangan antara nilai spiritual, sosial, dan ekologis agar tetap relevan di era modern. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terkait vihara seperti yang dilakukan oleh Maharani et al. (2025), Larasati dan Lianto (2024), serta Mahayani et al. (2025) menjadi pijakan penting dalam pengembangan perspektif multidisipliner yang memadukan unsur sejarah, arsitektur, budaya, dan pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan wawancara langsung di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran Vihara Dharma Manggala sebagai pusat penguatan nilai sosial dan spiritualitas umat Buddha Tionghoa di Pekanbaru. Melalui studi kepustakaan, peneliti menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk membangun dasar teori mengenai konsep nilai sosial, spiritualitas Buddhis, serta peran vihara dalam konteks sosial budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Sementara itu, data lapangan diperoleh melalui wawancara langsung (in-depth interview) dengan pengurus dan umat Vihara Dharma Manggala. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai aktivitas keagamaan, sosial, dan nilai-nilai yang dihidupi oleh komunitas umat Buddha Tionghoa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Tionghoa

Sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan kisah panjang mengenai perjalanan migrasi, perdagangan, dan akulterasi budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Hubungan antara Tiongkok dan kepulauan Nusantara telah tercatat sejak masa Dinasti Han, sekitar abad ke-2 sebelum Masehi, melalui jalur perdagangan laut yang dikenal sebagai jalur sutra maritim. Pada masa tersebut, pedagang-pedagang dari Tiongkok datang ke wilayah Asia Tenggara untuk melakukan pertukaran barang seperti sutra, keramik, dan rempah-rempah, serta menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara. Menurut Kristiono (2018), migrasi awal ini bukan sekadar

aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi awal terbentuknya jaringan sosial dan budaya antara masyarakat Tionghoa dan penduduk lokal, yang kelak melahirkan komunitas Tionghoa peranakan di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam periode selanjutnya, terutama pada masa Dinasti Tang (618–907 M) dan Song (960–1279 M), intensitas hubungan antara Tiongkok dan Nusantara meningkat pesat. Banyak pelaut dan pedagang Tionghoa yang menetap di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Palembang, Tuban, Gresik, dan Banten. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga sistem nilai, tradisi, serta ajaran filsafat Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme yang kemudian memengaruhi perkembangan spiritualitas masyarakat lokal. Kristiono (2018) menegaskan bahwa keberadaan komunitas Tionghoa di Indonesia pada periode ini relatif harmonis, di mana interaksi antarbudaya berlangsung dalam suasana saling menghormati dan tanpa segregasi sosial yang berarti. Komunitas Tionghoa bahkan berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadi penghubung perdagangan antara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Situasi tersebut mengalami perubahan signifikan pada masa kolonial Belanda. Kedatangan bangsa Eropa mengubah struktur sosial dan ekonomi di Nusantara, termasuk posisi masyarakat Tionghoa di dalamnya. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem sosial yang bersifat diskriminatif melalui kebijakan wijkenstelsel dan passenstelsel, yang membatasi mobilitas serta ruang sosial etnis Tionghoa. Mereka digolongkan sebagai “Vreemde Oosterlingen” atau “Timur Asing” dan ditempatkan dalam posisi sosial yang berbeda dari penduduk pribumi maupun bangsa Eropa (Kristiono, 2018). Kebijakan ini tidak hanya menciptakan pemisahan sosial, tetapi juga menumbuhkan stereotip negatif terhadap komunitas Tionghoa yang dipandang eksklusif dan berbeda dari masyarakat Indonesia lainnya.

Kristiono (2018) menjelaskan bahwa dalam konteks sejarah kolonial tersebut muncul proses demonisasi terhadap etnis Tionghoa, yakni upaya sistematis untuk menggambarkan mereka secara negatif melalui bahasa, kebijakan, dan representasi sosial. Salah satu bentuk konkret dari proses ini adalah pergeseran terminologi dari “Tionghoa” menjadi “Cina”, yang sarat dengan konotasi politis dan peyoratif. Pergeseran istilah ini tidak sekadar perubahan linguistik, tetapi mencerminkan transformasi ideologis yang berusaha mengikis identitas kultural Tionghoa dan menempatkan mereka sebagai kelompok “lain” dalam konstruksi kebangsaan Indonesia. Menurut Kristiono (2018), penggunaan istilah “Cina” secara masif pada masa Orde Baru merupakan bagian dari politik identitas yang bertujuan untuk menekan ekspresi budaya Tionghoa serta mengontrol peran mereka dalam kehidupan sosial dan politik nasional.

Kebijakan asimilasi yang diberlakukan pada era Orde Baru semakin memperkuat marginalisasi identitas Tionghoa di Indonesia. Melalui berbagai regulasi seperti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa, ekspresi budaya dan keagamaan Tionghoa dibatasi secara ketat. Upacara keagamaan, penggunaan aksara Mandarin, hingga perayaan Imlek dilarang secara terbuka di ruang publik. Kristiono (2018) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya ruang ekspresi budaya, tetapi juga menciptakan trauma sosial yang mendalam di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Dalam pandangan historis, kebijakan diskriminatif ini menunjukkan bagaimana etnis Tionghoa dijadikan objek politik kekuasaan melalui proses delegitimasi identitas dan penyeragaman nasionalisme yang sempit.

Meskipun mengalami tekanan politik dan sosial yang berat, komunitas Tionghoa tetap mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan nasional. Setelah reformasi tahun 1998, terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan negara terhadap kelompok Tionghoa. Pemerintah mulai mencabut berbagai larangan yang membatasi ekspresi budaya dan keagamaan mereka. Tahun 2000 menjadi momentum penting ketika

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 dan mengakui kembali keberadaan kebudayaan Tionghoa sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Langkah ini menjadi titik balik bagi masyarakat Tionghoa untuk menegaskan kembali identitas mereka, termasuk dalam menjalankan ajaran agama Buddha, Konfusianisme, dan Taoisme secara terbuka (Kristiono, 2018).

Pasca-reformasi, masyarakat Tionghoa berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Mereka mendirikan kembali vihara, kgenteng, dan organisasi sosial yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintah. Dalam konteks inilah, kebangkitan spiritualitas Tionghoa menjadi simbol dari pemulihkan identitas kultural yang sempat terpinggirkan. Vihara tidak hanya menjadi tempat peribadatan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas komunitas serta memperluas dialog antaragama. Sebagaimana diuraikan Kristiono (2018), proses rekonstruksi identitas Tionghoa pasca-Orde Baru menandai fase baru dalam perjalanan sejarah mereka di Indonesia—sebuah fase yang menekankan pada integrasi, partisipasi, dan pengakuan terhadap pluralitas budaya bangsa.

Dengan demikian, sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika hubungan antara kekuasaan, identitas, dan kebudayaan. Dari masa perdagangan kuno hingga era reformasi, komunitas ini telah memainkan peran penting dalam membentuk wajah sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Namun, perjalanan panjang tersebut juga diwarnai oleh periode diskriminasi dan politik identitas yang kompleks. Sebagaimana disimpulkan oleh Kristiono (2018), pemahaman terhadap sejarah Tionghoa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya reflektif untuk melihat bagaimana kekuasaan politik membentuk persepsi publik terhadap kelompok etnis, serta bagaimana masyarakat Tionghoa sendiri terus berupaya membangun kembali martabat dan identitas mereka di tengah keragaman bangsa Indonesia.

### **Masuknya Tionghoa Ke Indonesia**

Masuknya masyarakat Tionghoa ke Indonesia merupakan hasil dari proses migrasi dan interaksi budaya yang panjang, yang berawal dari hubungan perdagangan antarwilayah Asia Timur dan Asia Tenggara sejak masa awal Masehi. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan kepulauan Nusantara telah membuka jalan bagi pertukaran komoditas, ide, serta budaya yang berlangsung secara intensif. Menurut Wibowo (2010), hubungan antara Tiongkok dan Nusantara tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial-politik di Tiongkok yang menyebabkan sebagian penduduknya bermigrasi ke wilayah-wilayah yang lebih stabil secara politik dan ekonominya. Dengan demikian, migrasi Tionghoa ke Indonesia bukanlah fenomena tunggal, melainkan proses historis yang melibatkan berbagai gelombang perpindahan manusia dari Tiongkok Selatan ke berbagai daerah di Nusantara.

Pada masa awal, interaksi antara pedagang Tionghoa dan penduduk lokal berlangsung melalui jalur perdagangan laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Palembang, Barus, Tanjungpura, Tuban, dan Gresik. Para pedagang Tionghoa membawa komoditas seperti sutra, porselen, dan logam, sementara mereka memperoleh rempah-rempah, hasil bumi, serta bahan tambang dari kepulauan Nusantara. Wibowo (2010) menegaskan bahwa hubungan ekonomi tersebut segera berkembang menjadi hubungan sosial dan kultural yang saling menguntungkan, karena masyarakat lokal melihat para pedagang Tionghoa sebagai mitra dalam kegiatan ekonomi, sementara orang Tionghoa mendapatkan tempat untuk bermukim dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pada fase inilah muncul bentuk-bentuk awal komunitas Tionghoa di beberapa wilayah pelabuhan Nusantara, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Tionghoa peranakan.

Selama masa Dinasti Tang dan Song, migrasi Tionghoa ke wilayah Asia Tenggara

semakin intensif. Banyak pelaut, pedagang, dan pekerja Tionghoa yang memilih menetap di wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia. Wibowo (2010) menyebut bahwa Tionghoa yang datang ke Nusantara umumnya berasal dari wilayah pesisir selatan Tiongkok, seperti Guangdong, Fujian, dan Hainan, yang secara geografis berdekatan dengan jalur pelayaran internasional. Mereka dikenal memiliki kemampuan berdagang yang tinggi, etos kerja yang kuat, serta keterampilan teknis yang membantu perkembangan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, masyarakat Tionghoa tidak hanya menjadi pendatang, tetapi juga agen perubahan sosial yang memperkaya struktur masyarakat Nusantara.

Selain faktor ekonomi, migrasi Tionghoa ke Indonesia juga didorong oleh faktor politik dan sosial di negeri asal mereka. Perang saudara, kekacauan sosial, dan pergantian dinasti di Tiongkok menyebabkan banyak orang mencari tempat yang lebih aman untuk bermukim. Wibowo (2010) mencatat bahwa pada masa Dinasti Ming dan Qing, gelombang migrasi Tionghoa ke Asia Tenggara meningkat pesat, terutama setelah pemerintah Tiongkok memperlonggar larangan berlayar bagi warga sipil. Banyak di antara mereka yang tidak kembali ke negeri asalnya, melainkan memilih membangun kehidupan baru di wilayah seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Medan. Di beberapa daerah, mereka menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas Tionghoa peranakan yang memiliki karakter budaya campuran antara tradisi Tiongkok dan nilai-nilai lokal Nusantara.

Interaksi budaya yang terjalin antara Tionghoa dan masyarakat lokal menciptakan proses akultiasi yang harmonis. Mereka memperkenalkan sistem pertanian baru, teknik perdagangan, serta nilai-nilai etika yang berakar pada ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Dalam waktu yang bersamaan, mereka juga mengadopsi bahasa, pakaian, dan adat istiadat masyarakat setempat. Wibowo (2010) menjelaskan bahwa proses akultiasi ini memperlihatkan kemampuan adaptif masyarakat Tionghoa dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial dan budaya. Akibatnya, muncul dua bentuk identitas sosial utama dalam komunitas Tionghoa: kelompok totok (pendatang baru yang masih mempertahankan budaya Tionghoa secara kuat) dan kelompok peranakan (keturunan hasil percampuran yang telah berasimilasi dengan budaya lokal).

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Tionghoa memainkan peran penting dalam sektor ekonomi kolonial. Mereka menjadi perantara perdagangan antara penduduk pribumi dan pemerintah kolonial Belanda. Wibowo (2010) mencatat bahwa posisi ini membawa ambivalensi bagi masyarakat Tionghoa: di satu sisi mereka dianggap berjasa dalam memperkuat perekonomian kolonial, namun di sisi lain mereka kerap dijadikan scapegoat atau pihak yang disalahkan ketika terjadi ketegangan sosial dan ekonomi. Kebijakan kolonial yang diskriminatif, seperti wijkenstelsel dan passenstelsel, secara tidak langsung memperkuat segregasi sosial antara masyarakat Tionghoa dan pribumi, serta memperdalam kesenjangan yang kelak menjadi sumber konflik sosial.

Meskipun demikian, kontribusi masyarakat Tionghoa terhadap perkembangan peradaban Indonesia tidak dapat diabaikan. Mereka berperan dalam membangun infrastruktur ekonomi, memperkenalkan teknologi baru, serta memperluas jaringan perdagangan internasional yang menjadikan Nusantara sebagai salah satu pusat perdagangan global. Di bidang budaya, masyarakat Tionghoa membawa pengaruh yang signifikan dalam seni, arsitektur, dan kuliner yang hingga kini masih menjadi bagian integral dari identitas budaya Indonesia. Wibowo (2010) menegaskan bahwa kehadiran masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah pembentukan bangsa yang majemuk. Mereka bukan sekadar kelompok imigran, tetapi bagian dari proses panjang pembentukan identitas nasional yang menghargai perbedaan dan mengakui kontribusi setiap kelompok etnis dalam pembangunan bangsa.

Dengan demikian, masuknya masyarakat Tionghoa ke Indonesia bukan hanya merupakan peristiwa migrasi ekonomi semata, melainkan juga proses historis yang berlapis

dan kompleks. Kehadiran mereka membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya Nusantara. Dalam perspektif Wibowo (2010), memahami perjalanan masyarakat Tionghoa di Indonesia berarti memahami esensi dari keberagaman itu sendiri—bahwa identitas Indonesia terbentuk melalui dialog peradaban yang panjang antara berbagai etnis, budaya, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu ruang kebangsaan yang inklusif dan dinamis.

### **Masuknya Tionghoa Ke Pekan Baru**

Proses migrasi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika perdagangan internasional dan sistem kolonial yang berkembang di Asia Tenggara sejak abad ke-15 hingga ke-19. Dalam konteks ini, Riau, termasuk Pekanbaru, menjadi salah satu wilayah strategis yang berfungsi sebagai simpul ekonomi penting di jalur perdagangan Selat Malaka. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan daerah ini sebagai tujuan utama para pedagang dan migran Tionghoa yang datang untuk mencari peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik (Salioso, Askarial, & Surya, 2016, hlm. 2).

Pada awal kedatangannya, kelompok Tionghoa di wilayah Riau sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi pesisir selatan Tiongkok, seperti Fujian dan Guangdong. Mereka merupakan kelompok perantau yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam berdagang di wilayah maritim Asia Tenggara. Migrasi ini sering kali dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dagang yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan besar seperti Guangzhou dan Xiamen menuju Batavia, Malaka, dan kemudian menyebar ke daerah-daerah pelabuhan lainnya, termasuk Siak dan Pekanbaru (Salioso et al., 2016, hlm. 3). Proses ini menunjukkan bahwa perpindahan etnis Tionghoa ke Pekanbaru bukanlah fenomena spontan, melainkan bagian dari jaringan mobilitas sosial-ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam catatan sejarah, Pekanbaru berkembang dari sebuah kawasan perdagangan kecil di tepi Sungai Siak menjadi pusat ekonomi penting pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sungai Siak berperan besar sebagai jalur utama arus barang dan manusia antara pedalaman Riau dan pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatera. Kondisi inilah yang kemudian menarik minat para pedagang Tionghoa untuk menetap di kawasan tersebut, mengingat potensi ekonominya yang tinggi. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pedagang, pengrajin, dan perantara dalam perdagangan hasil bumi seperti karet, kopra, rempah-rempah, dan timah yang pada masa itu menjadi komoditas utama ekspor daerah (Salioso et al., 2016, hlm. 4).

Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor sosial-politik yang turut mendorong migrasi orang Tionghoa ke Pekanbaru. Pemerintah kolonial Belanda pada masa itu menerapkan sistem sosial yang bersifat hirarkis, di mana masyarakat dikelompokkan ke dalam lapisan-lapisan etnis tertentu. Dalam sistem tersebut, kelompok Tionghoa sering kali ditempatkan sebagai middleman minority, yaitu kelompok perantara ekonomi antara penguasa kolonial dan masyarakat pribumi. Posisi ini memberikan mereka peluang besar untuk berkembang secara ekonomi, tetapi sekaligus menempatkan mereka dalam posisi sosial yang terpisah dari komunitas lokal (Salioso et al., 2016, hlm. 5).

Meski demikian, etnis Tionghoa menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang tinggi terhadap lingkungan barunya. Melalui interaksi dengan masyarakat Melayu setempat, mereka membentuk pola kehidupan yang saling melengkapi antara budaya dagang Tionghoa dan nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, terjadi pula akulturasi budaya yang ditandai dengan munculnya bentuk-bentuk budaya sinkretik seperti penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi sehari-hari, partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan setempat, hingga terjadinya perkawinan campur antar-etnis (Salioso et al., 2016, hlm. 6). Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa di Pekanbaru tidak hidup dalam isolasi, melainkan aktif berpartisipasi dalam membangun struktur sosial yang inklusif dan

dinamis.

Pada awal abad ke-20, keberadaan komunitas Tionghoa di Pekanbaru semakin menguat. Mereka mulai membentuk permukiman yang lebih permanen di sekitar kawasan Senapelan, yang kini dikenal sebagai kawasan Pasar Bawah. Kawasan ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan interaksi sosial yang melibatkan berbagai etnis. Di sinilah terbentuk identitas khas Tionghoa Pekanbaru yang menampilkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional Tionghoa dan budaya lokal Melayu Riau. Menurut Salioso, Askarial, dan Surya (2016, hlm. 7), komunitas ini dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kemandirian, dan solidaritas internal yang kuat, yang semuanya menjadi modal sosial penting dalam mempertahankan eksistensi mereka di tengah dinamika sosial ekonomi kota.

Kultur sosial etnis Tionghoa di Pekanbaru sangat kental dengan nilai-nilai konfusius, seperti penghormatan terhadap orang tua, pentingnya pendidikan, dan etika kerja keras. Nilai-nilai ini tercermin dalam pola hubungan antarsesama anggota komunitas dan dalam praktik bisnis yang mereka jalankan. Etnis Tionghoa tidak hanya berperan sebagai pedagang atau pengusaha, tetapi juga sebagai agen sosial yang turut membangun ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan jaringan usaha yang luas (Salioso et al., 2016, hlm. 8). Kekuatan jaringan sosial ini menjadikan mereka sebagai salah satu kelompok ekonomi yang cukup berpengaruh di Pekanbaru.

Salah satu kawasan yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi komunitas Tionghoa di Pekanbaru adalah kawasan bisnis Setia Budi. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan perkantoran yang banyak dikelola oleh pengusaha Tionghoa. Melalui studi kasus di kawasan tersebut, Salioso, Askarial, dan Surya (2016, hlm. 9) menemukan bahwa kultur sosial etnis Tionghoa sangat memengaruhi cara mereka berkompetisi dalam dunia bisnis. Persaingan yang ketat di antara pelaku usaha justru memperkuat nilai solidaritas internal dan rasa saling percaya antaranggota komunitas, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, etnis Tionghoa di Pekanbaru juga memainkan peran penting dalam membentuk wajah sosial kota yang plural. Di tengah kemajemukan etnis di Pekanbaru, mereka berhasil menunjukkan kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dengan kelompok lain, termasuk masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Batak. Hubungan antaretnis ini tidak selalu berjalan tanpa gesekan, namun dalam banyak hal menunjukkan adanya pola coexistence dan mutual cooperation yang harmonis. Sebagaimana dijelaskan oleh Salioso et al. (2016, hlm. 10), etnis Tionghoa di Pekanbaru telah bertransformasi dari komunitas perantau menjadi bagian integral dari identitas sosial kota yang multikultural.

Proses panjang kehadiran Tionghoa di Pekanbaru juga ditandai dengan berdirinya berbagai institusi sosial dan keagamaan yang memperkuat identitas budaya mereka. Pendirian vihara, krenteng, dan yayasan sosial bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Institusi-institusi ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai leluhur serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah perubahan zaman (Salioso et al., 2016, hlm. 11). Keberadaan Vihara Dharma Manggala, misalnya, menjadi bukti nyata peran aktif komunitas Tionghoa dalam membangun kehidupan sosial dan spiritual yang harmonis di Pekanbaru.

Dengan demikian, masuknya etnis Tionghoa ke Pekanbaru tidak hanya meninggalkan jejak ekonomi, tetapi juga jejak kultural dan spiritual yang mendalam. Mereka menjadi bagian dari sejarah perkembangan kota yang tidak dapat diabaikan. Adaptasi sosial, kemampuan ekonomi, dan daya tahan budaya yang dimiliki menjadikan komunitas Tionghoa sebagai salah satu pilar penting dalam terbentuknya struktur masyarakat multikultural di Pekanbaru masa kini (Salioso et al., 2016, hlm. 12).

## **Nilai Sosial Budaya dan Spiritualitas Umat Budha Tionghoa di Vihara Dharma Manggala**

Vihara Dharma Manggala merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan umat Buddha Tionghoa di Kota Pekanbaru yang berdiri pada tahun 2010. Berdirinya vihara ini tidak hanya menjadi tonggak penguatan spiritual umat, tetapi juga sebagai simbol integrasi nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Tionghoa Buddhis di wilayah tersebut. Pada awal pembentukannya, Vihara Dharma Manggala dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Purwodi, yang kemudian menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada yayasan yang menaungi vihara tersebut. Saat ini, vihara tersebut menjadi bagian dari jaringan lima vihara di Kota Pekanbaru, dengan Vihara Dharma Loka yang berlokasi di Pasar Bawah sebagai pusat utama dari seluruh kegiatan keagamaan umat Buddha di daerah tersebut. Keberadaan struktur organisasi yang terhubung ini memperlihatkan adanya sistem kelembagaan yang tertata rapi serta menunjukkan nilai kebersamaan dan solidaritas dalam pengelolaan lembaga keagamaan Tionghoa di Pekanbaru.

Kegiatan keagamaan di Vihara Dharma Manggala dilaksanakan secara rutin setiap malam Minggu, yang menjadi waktu utama bagi umat untuk melakukan puja bakti, meditasi, serta pembinaan spiritual. Aktivitas ini memiliki fungsi ganda, yakni sebagai bentuk pelaksanaan ritual keagamaan sekaligus sebagai wadah sosial untuk mempererat hubungan antarumat. Dalam wawancara, disebutkan bahwa meskipun kegiatan di vihara ini berskala kecil, terutama pada hari-hari biasa, namun pada momen-momen besar seperti Tahun Baru Imlek dan hari-hari raya keagamaan Buddha, kegiatan menjadi lebih besar dan melibatkan lebih banyak umat. Adapun hari-hari besar Buddhis yang diperingati di vihara ini meliputi Hari Raya Waisak, Asadha, Magha Puja, dan Katina — empat perayaan utama dalam kalender keagamaan Buddha yang masing-masing memiliki makna spiritual mendalam bagi pemeluknya. Tradisi perayaan ini mencerminkan kesinambungan antara praktik spiritual dengan nilai budaya Tionghoa yang menjunjung tinggi kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur.

Selain fungsi ritual dan spiritual, Vihara Dharma Manggala juga memiliki peran sosial yang kuat di tengah masyarakat multikultural Pekanbaru. Vihara ini terbuka bagi masyarakat lintas agama, dan menjadi ruang dialog sosial antarumat beragama. Menurut hasil wawancara, vihara ini kerap menjadi tempat konsultasi atau mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial antarwarga tanpa memandang latar belakang agama. Nilai keterbukaan dan solidaritas lintas iman ini memperlihatkan tingginya tingkat toleransi yang dihidupi oleh komunitas Buddha Tionghoa di Pekanbaru. Bentuk konkret dari semangat toleransi tersebut tampak dalam kegiatan berbagi takjil kepada umat Muslim pada bulan Ramadan dan kunjungan lintas agama dalam perayaan-perayaan besar. Sikap inklusif ini sejalan dengan nilai-nilai budaya Tionghoa yang menekankan pada ren (仁) atau kemanusiaan universal, serta semangat he (和) yang berarti keharmonisan dan keselarasan sosial (Udayana, 2022, hlm. 47).

Kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh vihara ini juga memperlihatkan struktur organisasi komunitas yang teratur dan aktif. Terdapat kelompok muda-mudi yang berperan seperti organisasi remaja masjid dalam konteks agama lain, yang berfungsi sebagai motor penggerak kegiatan internal vihara serta wadah pembinaan generasi muda dalam ajaran moral dan etika Buddhis. Selain itu, terdapat pula organisasi Wanita Buddhis Indonesia (WBI) yang diisi oleh para ibu-ibu umat Buddha Tionghoa. WBI secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pembagian sembako kepada panti asuhan dan masyarakat kurang mampu, serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa spiritualitas di Vihara Dharma Manggala tidak berhenti pada praktik keagamaan formal, tetapi diwujudkan dalam bentuk tindakan sosial yang nyata, mencerminkan nilai karuṇā (kasih sayang) dan mettā (cinta kasih universal) yang merupakan inti ajaran Buddha.

Nilai-nilai sosial dan spiritual yang tumbuh di Vihara Dharma Manggala merepresentasikan perpaduan antara ajaran Buddhisme dan tradisi budaya Tionghoa yang telah berakar kuat. Seperti dijelaskan oleh Udayana (2022, hlm. 51), spiritualitas dalam konteks masyarakat Tionghoa tidak hanya dimaknai sebagai hubungan vertikal dengan kekuatan transenden, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, spiritualitas menjadi fondasi bagi terciptanya keharmonisan keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Vihara Dharma Manggala mengaktualisasikan pandangan tersebut melalui pembinaan mental dan moral umat agar memiliki kesadaran sosial yang tinggi, menjunjung nilai kasih, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Lebih jauh lagi, peran sosial Vihara Dharma Manggala juga dapat dipahami sebagai bentuk penguatan identitas budaya Tionghoa di Pekanbaru. Melalui kegiatan keagamaan dan sosial, komunitas Buddha Tionghoa tidak hanya mempertahankan tradisi leluhur mereka, tetapi juga menegaskan keberadaan mereka sebagai bagian integral dari masyarakat kota yang multikultural. Aktivitas-aktivitas lintas agama yang dilakukan di vihara ini berfungsi sebagai media cultural bridge yang menjembatani perbedaan dan memperkokoh rasa persaudaraan di antara warga. Semangat harmoni yang dikembangkan oleh vihara ini sangat relevan dengan prinsip ajaran Buddha tentang paticcasamuppāda (saling ketergantungan), yang mengajarkan bahwa kesejahteraan individu hanya dapat dicapai melalui kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, Vihara Dharma Manggala tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha Tionghoa, tetapi juga sebagai pusat pembentukan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Kehidupan keagamaan di vihara ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan nilai budaya dapat berjalan beriringan dalam membangun masyarakat yang damai dan toleran. Melalui praktik sosial yang berlandaskan kasih, empati, dan keterbukaan, umat Buddha Tionghoa di Pekanbaru menunjukkan bahwa keimanan sejati terwujud bukan semata dalam ritual, melainkan dalam tindakan nyata yang memuliakan kemanusiaan (Udayana, 2022, hlm. 53).



Gambar 1 & 2 Vihara Dharma Manggala

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 3 & 4

Sumber : Dokumentasi Pribadi

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Vihara Dharma Manggala di Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat penguatan nilai sosial dan spiritualitas umat Buddha Tionghoa. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai ruang sosial, budaya, dan pendidikan moral yang memperkuat solidaritas internal komunitas Tionghoa serta memperluas hubungan harmonis dengan masyarakat multikultural di sekitarnya.

Pertama, dari segi spiritualitas, Vihara Dharma Manggala menjadi wadah pembinaan iman dan penghayatan ajaran Buddha bagi umat Tionghoa. Melalui kegiatan rutin seperti puja bakti, meditasi, dan perayaan hari besar agama Buddha seperti Waisak, Asadha, Magha Puja, dan Katina, vihara ini membantu umat untuk memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai Dharma. Nilai-nilai seperti welas asih (karuna), kebijaksanaan (prajna), dan kesadaran diri (sati) diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga spiritualitas tidak hanya menjadi aspek pribadi tetapi juga sumber motivasi sosial bagi umat.

Kedua, dari aspek sosial dan budaya, Vihara Dharma Manggala berperan sebagai wadah integrasi dan dialog antarbudaya. Umat Buddha Tionghoa di Pekanbaru menjadikan vihara sebagai simbol keberlanjutan tradisi leluhur sekaligus sebagai media interaksi lintas etnis dan agama. Melalui kegiatan sosial seperti berbagi takjil di bulan Ramadan, bakti sosial, serta kunjungan lintas agama, vihara ini menumbuhkan semangat toleransi, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat majemuk. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Buddhisme dan tradisi Tionghoa dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan kebhinekaan Indonesia.

Ketiga, secara historis dan kultural, Vihara Dharma Manggala merupakan representasi dari proses panjang akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya lokal Melayu Riau. Arsitektur, simbolisme, dan sistem pengelolaan vihara mencerminkan keseimbangan antara pelestarian identitas etnis dan keterbukaan terhadap budaya setempat. Dengan demikian, vihara ini menjadi bukti nyata dari keberhasilan masyarakat Tionghoa dalam mempertahankan jati diri spiritualnya tanpa kehilangan rasa kebangsaan dan keterikatan terhadap lingkungan sosialnya.

Keempat, dari sisi pendidikan dan pembinaan moral, vihara ini berfungsi sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda dalam memahami ajaran Buddha sekaligus menanamkan nilai-nilai kebajikan, kerja keras, disiplin, dan rasa hormat terhadap sesama. Melalui kegiatan pendidikan non-formal seperti kelas Dhamma dan pelatihan sosial-keagamaan, vihara berkontribusi pada pembentukan karakter moral dan spiritual generasi muda Tionghoa Buddhisme yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap berpegang pada nilai-nilai luhur leluhur mereka.

Secara keseluruhan, Vihara Dharma Manggala berperan sebagai pusat spiritual, sosial, dan kultural yang berfungsi menjaga keseimbangan antara religiusitas, kemanusiaan, dan kebhinekaan. Peran ganda vihara sebagai tempat ibadah sekaligus ruang sosial menegaskan pentingnya lembaga keagamaan dalam memperkuat integrasi sosial dan harmoni antarumat beragama di Indonesia. Melalui aktivitasnya, vihara ini tidak hanya memperkokoh keimanan umat Buddha Tionghoa, tetapi juga menjadi pilar penguat perdamaian, toleransi, dan keberagaman budaya di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kristiono, M.J. (2018) ‘Dari Tionghoa ke Tjina: Telaah sejarah terhadap demonisasi etnis Tionghoa di Indonesia’, Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal), 10(19), pp. 34–48.

- Larasati, M.D. and Lianto, F. (2024) ‘Revitalisasi Vihara Amurva Bhumi dengan Pendekatan Livability Space’, *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 6(2), pp. 1687–1702.
- Maharani, P.E.A., Purnawati, D.M.O. and Martayana, I.P.H.M. (2025) ‘Menyongsong Harmoni: Pergulatan Sejarah, Akulturasi, dan Potensi Vihara Amurva Bhumi Blahbatuh, Gianyar sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA’, *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1), pp. 39–56.
- Mahayani, N.N.D.S., Yasa, I.W.P. and Martayana, I.P.H.M. (2025) ‘Vihara Dharma Ratna dan Klenteng Zhong Yi Miao di Semarapura Kauh, Klungkung, Bali (Sejarah, Nilai Multikultur, dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA)’, *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 7(1).
- Salioso, H., Askarial, M.H. and Surya, W.H. (2016) ‘Kultur Sosial Etnik China Dalam Persaingan Bisnis: Studi Kasus Etnik China (Tionghoa) Di Kawasan Bisnis Setia Budi Pekanbaru’, *VALUTA*, 2(1), pp. 1–16.
- Udayana, C. (2022) Hubungan antara Spiritualitas dan Nilai-Nilai Budaya Tionghoa dengan Kepuasan Pernikahan pada Pasutri Kristen di Gereja-Gereja Tionghoa di Surabaya. Doctoral dissertation.
- Wibowo, P. (2010) ‘Tionghoa Dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis Tentang Posisi dan Identitas’, in *Proceedings of The 4th International Conference on Indonesia Studies: Unity, Diversity and Future*. Jakarta: FIB Universitas Indonesia.
- Wawancara langsung dengan pengurus Vihara Dharma Manggala, Pekanbaru (2025).